

OPTIMALISASI PARTAI ACEH SEBAGAI INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2019 DI KOTA BANDA ACEH

Nofriadi¹, Nada Nafira Almanzani², dan Hawary Annisa³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala
(Penulis korespondensi: nofriadi_fisip@unsyiah.ac.id)

Masuk: 22 Februari 2021; Diterima: 29 Mei 2021; Dipublikasikan: 01 Juni 2021

Abstrak

Masyarakat diberi ruang dan kesempatan untuk memberikan pendapat yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menggunakan infrastruktur politik untuk mempengaruhi masyarakat. Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan salah satu bentuk demokrasi dalam mewujudkan partisipasi politik. Di Aceh sendiri, salah satu partai politik yang paling berpengaruh adalah Partai Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi parpol dalam memaksimalkan diri sebagai infrastruktur politik, khususnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Aceh. Makalah ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan bahan referensi yang digunakan penulis sebagian besar dari bahan bacaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu 2019 relatif tinggi di Kota Banda Aceh yaitu mencapai 78,67%, melebihi target nasional sebesar 77,5%. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap kader di lingkungan Partai Aceh. Oleh karena itu, parpol harus dapat mengoptimalkan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi pemilih sesuai dengan tujuan awal pembentukan parpol dalam mendukung pelaksanaan sistem politik.

Kata kunci: Partai Politik; Infrastruktur Politik; Partisipasi Masyarakat; Partai Aceh.

Abstract

The public is given the space and opportunity to give opinions, which has been guaranteed in the relevant laws and regulations. As a democracy, Indonesia uses political infrastructure to influence society. In a democratic country, political parties are one form of democracy in realizing political participation. In Aceh itself, one of the most influential political parties is Partai Aceh. This study aims to determine the extent to which political parties function in maximizing themselves as political infrastructure, especially to increase the participation of the Acehnese people. This paper uses a literature study research method with the reference material used by the author mostly from reading material or secondary data. The results showed that voter participation in the 2019 election was relatively high in the city of Banda Aceh, reaching 78.67%, exceeding the national target of 77.5%. One factor that greatly influenced the high voter turnout in the 2019 Election was the increasing trust of the Acehnese people in cadres within the Aceh Party. Therefore, political parties must be able to optimize their function in increasing voter participation following the original purpose of forming political parties in supporting the implementation of the political system.

Keywords: Political Parties; Political Infrastructure; Community Participation; Aceh Party.

PENDAHULUAN

Miriam Budiardjo, guru besar dan pakar politik Indonesia, melihat partai politik sebagai sebuah kelompok yang terorganisir dimana anggotanya mempunyai orientasi, nilai serta cita-cita yang sama (Suharyanto, 2016). Seiring berkembangnya zaman, partai politik pun terus berkembang. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang setiap harinya terus berkembang dan juga dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan ideologi di berbagai wilayah di dunia. Hal ini membuat pandangan terhadap partai politik bertambah kompleks dan meliputi banyak bidang yang ada di dalam masyarakat. Partai politik di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan pengaruh bagi masyarakat, karena partai politik sudah menjadi bagian dari masyarakat. Partai politik lahir sebagai jawaban dari problematika yang ada di dalam masyarakat.

Pada umumnya partai politik memiliki empat fungsi yang menggambarkan eksistensinya, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik (Asshiddiqie, 2014). Fungsi partai politik diatas saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebagai komunikasi politik, partai politik memainkan peran penting dalam upaya menerjemahkan urusan atau hal yang

terjadi di dalam masyarakat. Urusan tersebut diserap oleh partai politik lalu dijadikan ide-ide dan gagasan yang berguna untuk kepentingan partai politik. Karena sejatinya, partai politik lahir atas kepentingan masyarakat dan kembali lagi untuk menghasilkan dan mencapai tujuan yang ada di dalam masyarakat.

Sebagai sosialisasi politik, partai politik bertugas memberikan pendidikan, khususnya pendidikan politik. Partai juga berperan dalam mewujudkan cita-cita negara. Sebagai rekrutmen politik, partai politik berfungsi dalam menyeleksi kader-kader yang ingin menjadi pemimpin nantinya, karena kader tersebut dipilih oleh rakyat secara langsung maupun tidak. Sebagai pengatur konflik, partai politik harus pintar dalam mengendalikan masalah yang terjadi dalam masyarakat dan harus mampu menangani dan mengendalikan masalah tersebut.

Partai politik merupakan organisasi politik formal yang dibangun oleh orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan tujuan guna menguasai pemerintahan dengan menempatkan anggotanya di pemerintahan melalui pemilu (Labolo dan Ilham, 2015). Sebuah negara yang gagal menjalankan partai politik dengan baik berarti secara otomatis gagal menjalankan demokrasi di negara tersebut. Karena salah satu tanda negara tersebut demokrasi ditandai dengan

pelaksanaan partai politik yang optimal dan dapat mempengaruhi masyarakat.

Sebagai infrastruktur politik, partai politik menjadi wadah untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu infrastruktur politik yang cukup signifikan pengaruhnya bagi masyarakat adalah partai politik. Untuk itu, partai politik diharapkan mampu menjadi wadah aspirasi masyarakat bukan sekelompok orang saja. Hingga saat ini, Indonesia menggunakan sistem multipartai yaitu terdapat beragam partai yang mengakomodir kepentingan yang sesuai dengan tujuan masyarakat. Partisipasi politik merupakan aktivitas seorang ataupun kelompok guna ikut aktif dalam kehidupan politik (Budiardjo, dalam Suharyanto, 2016).

Di Aceh tepatnya setelah MoU Helsinki ditandatangani, politik di Aceh menjadi semakin menarik dan berdinamika. Hal ini ditandai dengan adanya Pilkada tahun 2006, Pemilu 2009, serta Pilkada 2012 yang membuat banyak perubahan. Seperti salah satunya adalah perubahan watak dalam kontestasi politik di Aceh sendiri. Dalam hal ini, muncul sebuah partai politik baru yaitu Partai Aceh yang berhasil menduduki tempat penting di ajang perpolitikan dan menggeser partai lainnya seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Demokrat, PPP, dan lainnya yang dulunya

lebih dulu berjaya di Aceh. Hal ini membuat Partai Aceh dianggap menjadi partai yang tergolong memiliki kekuatan yang kuat di dalam politik itu sendiri sekaligus memunculkan wajah baru dari Partai Aceh yang dapat mendominasi ranah politik di Aceh yang juga dapat mempengaruhi jalannya tatanan kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam sistem politik di Indonesia, pemilihan umum adalah salah sebuah proses politik yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Adapun dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah beserta wakilnya dilaksanakan dengan adanya pemilihan secara langsung oleh masyarakat melalui Pilkada. Di Aceh sendiri, khususnya Kota Banda Aceh yang memiliki 9 kecamatan dengan 90 desa juga dilangsungkan Pilkada dimana jumlah penduduknya sebesar 265.111 orang (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2021) dan yang memiliki hak pilih sebanyak 151.105 orang (Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2017).

Partai Aceh selaku partai lokal yang memiliki pendukung yang masih kuat, baik pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, ditandai dengan momentum kemenangannya pada Pemilu tahun 2009, pada Pemilu tahun 2014 Partai Aceh meraih 29,17% suara, dan pada tahun 2019 Partai Aceh berhasil meraih 18 dari 81 kursi DPR Aceh. Partai politik memiliki

kaitan dengan partisipasi masyarakat ditandai dengan adanya ajang kontestasi antar partai politik saat Pemilu yang mana ialah salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat yang berperan dalam mempresentasikan kedaulatan masyarakat. Partisipasi politik dan Pemilu sangat bergantung dan dipengaruhi oleh masyarakat dalam mewujudkan proses demokrasi yang ideal.

Keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu menunjukkan bahwa tatanan demokrasi dalam suatu negara semakin kuat. Disamping itu, partai politik bekerja keras untuk melembagakan politik guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan partai untuk mewujudkan cita-citanya. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menulis mengenai Partai Aceh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019. Maka dari hal tersebut tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 di Aceh khususnya di Banda Aceh dianggap sudah cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Sebagai infrastruktur politik, partai politik memiliki peran krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada Pemilu tahun 2019, tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Banda Aceh tergolong tinggi mencapai 78,67% yang melampaui dari target nasional yaitu 77,5%. Maka, jurnal ini akan mengkaji

bagaimana optimalisasi peran partai politik sebagai infrastruktur politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 Kota Banda Aceh dengan menggunakan studi kasus Partai Aceh.

METODELOGI

Artikel ini menggunakan studi pustaka atau *library research* sebagai metode penelitian dimana bahan rujukan yang digunakan penulis bersumber dari bahan bacaan dari referensi terpercaya dan dari bermacam-macam literatur ilmiah. Metode studi pustaka ini menggunakan bahan-bahan bacaan untuk mengumpulkan data melalui bahan bacaan sehingga data yang terdapat di tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan bahan literasi dari studi pustaka yang tersedia. Data yang terdapat pada jurnal ini di dapat dengan mengumpulkan data dari bahan bacaan berupa artikel, bahan tertulis, hasil penelitian terdahulu, koran, buku, jurnal, laporan resmi, dan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan jurnal ini, serta dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Data yang sudah didapat dari pendekatan studi pustaka dianalisis oleh penulis dan dikembangkan sehingga penulis dapat menghasilkan jurnal ini.

PEMBAHASAN

Michael Rush dan Philip Althof menggambarkan partisipasi politik sebagai aktivitas masyarakat yang terorganisir untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi bentuk dan proses kebijakan (Hendrik, 2010). Partisipasi politik terbagi dua, yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif meliputi pengusulan kebijakan secara keseluruhan; pengusulan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah; pengusulan kritik dan saran perbaikan untuk pembenahan kebijakan. Partisipasi pasif yaitu ketaatan kepada pemerintah dan hanya menerima dan melaksanakan kegiatan yang diputuskan oleh pemerintah (Surbakti, dalam Shobari, 2017).

Pengertian partisipasi politik diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan keinginan masyarakat dalam mengambil bagian pada sistem politik secara sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun dan ikut mengambil peran dalam proses politik atas kemauan dan keinginannya sendiri. Partisipasi politik memiliki arti terjun atau ikut serta dalam ajang perpolitikan yang mana dapat berpatokan pada keinginan mereka untuk mengikutsertakan diri mereka dalam berpolitik dengan sukarela dari diri masing-masing tanpa intervensi dari pihak manapun.

Oleh karena itu, partisipasi politik erat kaitannya dengan partai politik dan Pemilu sangat penting tujuannya dalam pelaksanaan negara demokrasi seperti Indonesia saat ini. Identitas demokrasi ditandai dengan adanya tingkat partisipasi yang tinggi oleh masyarakat. Partisipasi politik memiliki fungsi (Robert Lane, dalam Rush dan Althof, 2000):

1. Selaku sarana mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik ada dan timbul serta menjadikan politik guna memperlancar usaha ekonomi ataupun fasilitas buat mencari keuntungan material.
2. Selaku fasilitas guna memuaskan kebutuhan untuk penyesuaian sosial, semacam pemenuhan harga diri, peningkatan status sosial, serta perasaan terhormat sebab memiliki relasi dengan orang terkemuka.
3. Selaku fasilitas buat mengejar nilai-nilai spesial ataupun tujuan tertentu, seperti memperoleh pekerjaan, memperoleh proyek- proyek untuk pejabat-pejabat.
4. Selaku fasilitas buat penuhi kebutuhan alam dasar manusia serta kebutuhan psikologi tertentu.

Partai politik awalnya ada dan berkembang di negara Eropa Barat pada abad ke-18 dimana lahirnya partai politik karena kebutuhan untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan setiap

daerah. Mulanya, terdapat pertemuan-pertemuan dari anggota legislatif yang memperjuangkan kepentingan daerah mereka. Di Indonesia sendiri, awal dari partai politik merupakan lahirnya Budi Utomo yaitu tempat berkumpulnya kalangan terpelajar yang merupakan wujud dari *studie club*, perkumpulan ekonomi, sosial, serta organisasi pembelajaran. Setelah Budi Utomo ada, hadirilah Sarekat Islam dan Indische Partij yang disebut sebagai partai politik awal di Indonesia (Labolo dan Ilham, 2015).

Lambat laun, partai politik di Indonesia semakin banyak dan beragam. Setidaknya, setiap partai politik memiliki empat unsur yaitu organisasi politik resmi, aktivis politik, aktivitas politik, dan tujuan politik (Labolo dan Ilham, 2015). Partai politik memiliki tujuan menguasai pemerintahan dengan menempatkan anggotanya di pemerintahan melalui pemilu (Labolo dan Ilham, 2015). Oleh karena itu, partai politik turut memainkan peran penting dalam tatanan kehidupan masyarakat khususnya dalam mempengaruhi masyarakat, karena bagaimanapun partai politik telah menjadi bagian dari masyarakat. Partai politik pun memiliki tujuan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap dunia politik yang buruk, sekaligus juga berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain (Labolo dan Ilham, 2015).

Partai Politik sebagai Infrastruktur Politik

Terdapat beberapa komponen dalam infrastruktur politik, yaitu partai politik, golongan kepentingan, media komunikasi politik, golongan penekan, dan tokoh politik (Risnawan, 2017). Indonesia sebagai negara demokrasi penggunaan infrastruktur politik dalam rangka mempengaruhi masyarakat merupakan identitas dari wajah demokrasi. Infrastruktur politik bisa dikatakan sebagai tameng dasar atau sebuah pondasi bagi dunia politik dalam suatu negara. Infrastruktur politik lebih cenderung memandang massa sebagai kekuatan politik dan sosial dalam masyarakat yang terbagi dalam berbagai kekuatan politik dan sosial (Suprayogi, dalam Priyanto, 2017).

Berbeda dengan infrastruktur politik, suprastruktur politik adalah kebalikan dari organisasi masyarakat tersebut yang berada dalam lingkungan masyarakat. Jika infrastruktur politik tadi adalah pondasi dasar dunia perpolitikan, maka suprastruktur politik merupakan bangunan kehidupan politik yang dapat diartikan sebagai struktur politik pemerintahan. Oleh karena itu, suprastruktur politik ialah seluruh lembaga negara dengan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang disebutkan dalam konstitusi negara (Priyanto, 2017).

Tabel 1
Fungsi Partai Politik

Komunikasi Politik	Sosialisasi Politik	Rekrutmen Politik	Pengatur Konflik
Partai politik dalam hal ini berfungsi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang nantinya aspirasi tersebut ditampung untuk disampaikan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan. Komunikasi politik ini tujuannya untuk menjadi perantara antara pemerintah dengan masyarakat.	Sosialisasi politik juga merupakan pendidikan politik yang berlangsung setiap saat dilingkungan masyarakat. Partai politik dibentuk untuk mensosialisasikan Pendidikan politik agar masyarakat menjadi sadar akan pentingnya politik dalam kehidupan kita.	Partai politik menjadi wadah bagi orang-orang yang tertarik dengan proses politik dan ingin masuk kedalam sistem politik. Partai politik menjadi batu loncatan awal agar karir politik seseorang menjadi lebih jauh lagi. Partai politik mengajak orang sebanyak-banyaknya agar masuk kedalam partai politik melalui sosialisasi politik tadi.	Dengan berbagai kepentingan dan banyaknya keinginan masyarakat yang multicultural dari berbagai daerah maka kemungkinan munculnya konflik pun semakin besar. Untuk itu, partai politik hadir untuk menampung kepentingan dan menjadi alat sebagai pengatur konflik. Konflik memang tidak dapat dihindari namun dapat diminimalisir dampaknya.

Sumber: Priyanto (2017).

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, suatu partai politik harus mampu memenuhi tujuan pembentukan dari partai politik itu sendiri, dimana fungsi-fungsi dari partai politik tersebut akan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, seperti fungsi-fungsi yang sebagaimana terdapat pada Tabel 1 diatas.

Lebih lanjut, dalam menjalankan fungsinya, partai politik juga tidak boleh memiliki pemahaman yang berbeda dan menentang ideologi dasar dan undang-undang NKRI. Semuanya harus sesuai dengan UUD 1945 dan juga Pancasila. Negara Indonesia sendiri sistem kepartaiannya menganut sistem multipartai. Dengan banyaknya partai yang

mengakomodir kepentingan masyarakat yang berbeda-beda tersebut pelaksanaannya harus sesuai dengan dasar negara kita. Adanya partai politik Indonesia tentu erat kaitannya dengan banyaknya gerakan politik yang terjadi. Diantara fungsi-fungsi yang dijelaskan dalam Tabel 1 diatas, partai politik diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Oleh karena itu, infrastruktur dan suprastruktur politik memiliki kaitan yang erat dalam pelaksanaan sistem politik di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Infrastruktur politik lebih dianggap sebagai organisasi informal non-pemerintah yang berada dipihak

masyarakat. Sedangkan suprastruktur politik merupakan lembaga negara yang diakui didalam konstitusi negara dalam menjalankan sistem politik. Partai politik berada dalam bagian infrastruktur politik yang sangat dekat hubungannya dengan masyarakat. Partai politik seharusnya tidak hanya menjadi wadah aspirasi saja tetapi mampu mengakomodir kepentingan masyarakat didalamnya.

Sebagai infrastruktur politik, sebuah partai politik harus bisa menjadi wadah yang mengupulkan berbagai kepentingan rakyat agar tidak terjadi perpecehan dan meminimalisir konflik dilingkungan masyarakat. Salah satu partai politik yang mempunyai pengaruh yang besar di daerah Kota Banda Aceh adalah Partai Aceh. Sebagai partai yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat Aceh, Partai Aceh diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya.

Geliat Partai Aceh

Memorandum of Understanding (MoU) yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI) pada 15 Agustus 2005 merupakan awal baru bagi masyarakat Aceh dalam ranah politik. Aceh diberikan hak untuk mendirikan partai politik yang aturannya tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Dengan adanya peraturan tersebut maka Aceh sah untuk membentuk partai politik lokal yang dapat bersaing dengan partai lainnya. Partai politik lokal tidak bisa dianggap remeh, dibuktikan dengan kemenangan partai politik lokal pada pemilu legislatif tahun 2009. Dan menurut perhitungan, partai Aceh masih menguasai parlemen tahun 2014 (Tasar, 2015).

Dengan adanya peristiwa kemenangan partai politik lokal yaitu Partai Aceh pada Pemilu 2009, secara langsung Partai Aceh pun menjadi pemegang kendali politik dan menjadi penguasa politik Aceh pada saat itu. Semua kontrol politik Aceh dimiliki oleh Partai Aceh. Pada kemenangan Pemilu 2009, pengurus Partai Aceh memimpin hampir semua daerah sebagai bupati, walikota, dan anggota dewan. Awal mula kemunculan partai politik lokal adalah untuk melakukan pembagian kerja antara partai-partai baik nasional maupun lokal yang ada di setiap daerah untuk kemudian disampaikan ke partai nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, partai politik lokal berupaya menyesuaikan dengan aspirasi seluruh masyarakat, dan partai politik lokal mengakomodir keinginan masyarakat di setiap daerah untuk tunduk kepada partai politik nasional dan mencari solusi atas permasalahan

tersebut. Partai Aceh sendiri merupakan salah satu partai yang mempunyai legitimasi dan sangat terkenal di kalangan masyarakat Aceh.

Dilihat dari sejarah awal mula Partai Aceh tidak lepas dari peristiwa Gerakan Aceh Merdeka. Sebagian besar anggota Partai Aceh adalah penentang pemerintah Indonesia pada masanya. Partai Aceh dipimpin oleh mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yaitu Muzakir Manaf (Hasan, 2019). Partai Aceh sendiri berupaya semaksimal mungkin dalam membentuk masyarakat Aceh yang makmur dan sejahtera melalui kader-kader terbaik. Partai Aceh memprioritaskan pelaksanaan MoU Helsinki untuk secara khusus membangun Aceh dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Partisipasi Politik Masyarakat Kota Banda Aceh

Dalam mengukur keberhasilan suatu negara demokrasi, kita dapat mengukurnya dengan tingkat partisipasi politik masyarakatnya, karena masyarakat juga dapat memberi sumbangsih dan sangat berpengaruh dalam dunia politik. Jika masyarakat aktif dan terlibat dalam ajang politik, maka dapat dikatakan sebuah daerah atau sebuah negara itu memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi.

Tingkat partisipasi politik di Aceh di Banda Aceh sudah meningkat, terlebih

pada Pemilu tahun 2019, partisipasi politik masyarakat Kota Banda Aceh sudah tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017 saat pemilihan Gubernur Aceh. Jika kita bandingkan tingkat partisipasi masyarakat Aceh pada tahun 2017 dengan tahun 2012 (tahun sebelumnya), tahun 2017 merupakan tahun dengan penurunan tingkat partisipasi masyarakat (Juliani *et al.*, 2020).

Namun pada pemilihan umum 2019 partisipasi masyarakat kembali meningkat, karena banyaknya masyarakat yang aktif dan terlibat langsung dalam kontestasi politik serta masyarakat menggunakan suaranya dalam pesta demokrasi. Komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh, Agusni, melalui siaran persnya menyatakan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Aceh pada tahun 2019 telah meningkat dan juga berhasil melampaui target nasional yang sudah ditargetkan sebelumnya (Kumparan, 2019). Jumlah masyarakat Aceh yang menggunakan hak suaranya sebesar 79 persen. Jika melihat perbandingan pada jumlah suara pemilu tahun 2014 hanya sebesar 72 persen suara yang masuk. Hal tersebut cukup membuktikan bahwasanya ada hal-hal yang dapat membuat penurunan atau peningkatan partisipasi politik masyarakat Aceh pada pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat Aceh pada pemilu 2019 berjumlah 79 persen sedangkan target

nasional sebesar 77,5 persen (Bawaslu Aceh, 2020).

Menurut Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) partisipasi pemilih masyarakat Kota Banda Aceh pada pemilu tahun 2019 terjadi peningkatan. Sebanyak 78,67 persen masyarakat kota Banda Aceh menggunakan hak suaranya. Jumlah tersebut juga melampaui target partisipasi pemilih nasional sebesar 77,5 persen. Hal ini dianggap sebagai tingkat partisipasi tertinggi dalam sejarah pemilu yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh.

Tahun 1995 merupakan tahun pertama kali Pemilu di Indonesia diselenggarakan yang dikenal dengan pemilu yang paling bersih dan tanpa kecurangan yang didukung oleh birokrat (Rozi, 2006). Seiring berjalannya waktu, Pemilu pun berlangsung dengan lebih beragam, lebih menimbulkan banyak

gejolak dan tentu banyak sekali warna-warni didalamnya. Hal tersebut juga terjadi pada Pemilu Kota Banda Aceh.

Table 2 berikut menunjukkan perkembangan tingkat partisipasi pemilih di berbagai tingkatan pemilihan di beberapa edisi. Berbeda dengan beberapa edisi, angka partisipasi pemilu 2019 sangat tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 78,63%. Ini membuktikan pemilu 2019 memiliki angka partisipasi tertinggi sepanjang sejarah, namun partisipasi masyarakat berfluktuasi.

Tingkat partisipasi masyarakat yang fluktuatif dapat dilihat dari beberapa alasan utama, antara lain masalah keamanan, politik uang, rendahnya kesadaran politik masyarakat, dan kurangnya sosialisasi penyelenggara menjadi faktor utama yang mendorong tingkat partisipasi masyarakat di Banda Aceh (Hardiyanti *et al.*, 2021).

Tabel 2
Perkembangan Partisipasi Politik
Masyarakat Aceh

Pemilihan Kepala Daerah	
Tahun	Tingkat Partisipasi
2006	59.41%
2012	56.32%
2017	63.92%
Pemilu Legislatif	
Tahun	Tingkat Partisipasi
2009	60.19%
2014	62.00%
Pemilihan Presiden	
Tahun	Tingkat Partisipasi
2009	63.41%
2014	53.00%

Sumber: KIP Kota Banda Aceh (Diolah)

Solusi terhadap permasalahan keamanan, politik uang, kesadaran politik publik yang rendah, dan kurangnya model sosialisasi yang dapat diterapkan oleh penyelenggara harus ditemukan agar tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Banda Aceh terus meningkat, bukan malah naik turun. Hal ini juga harus diperhatikan oleh partai-partai yang ada di Aceh, khususnya Partai Aceh.

Partai Aceh cenderung ditatap selaku salah satu partai gubahan dari organisasi bersenjata GAM karena dibangun oleh mantan anggota dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Turbulensi yang terjadi dalam Partai Aceh di dini pembentukannya pula dilatarbelakangi oleh kecurigaan banyak golongan kalau Partai Aceh cumalah wujud lain dari perjuangan bersenjata yang saat ini berwajah politik. Perihal tersebut bukan perihal mengejutkan sebab semenjak dini kemunculannya, Partai Aceh sudah memunculkan banyak polemik, seperti pemakaian nama Partai GAM, pemakaian bendera GAM selaku bendera serta lambang partai.

Keanggotaan Partai Aceh cenderung lebih terbuka dibanding keanggotaan GAM secara struktural. Keterbukaan ini bisa dilihat lewat keterbukaannya dalam rekrutmen keanggotaan. Tidak hanya sebab alibi administratif, perihal tersebut pula

dilatarbelakangi oleh logika politik buat menguatkan premise suara yang sangat logis sebab logika suara kebanyakan memiliki peran untuk kemenangan Partai Aceh dalam pemilu (Hajad, 2016).

Dalam hal mencalonkan diri dalam pemilu, Partai Aceh memiliki cara dengan menunjuk seorang anggota sebagai komandan dengan mengedepankan popularitas atau pengaruh dari zona perlawanan dan mencalonkan calon untuk pemilihan umum berdasarkan tingkat popularitas dan pengaruh. Dari segi popularitas, calon pemimpin juga bisa dipilih karena calon lebih dikenal luas oleh masyarakat dan popularitas adalah nilai tambah dari calon pemimpin.

Berdasarkan Tabel 3 pada halaman berikutnya, dapat kita ketahui bahwasanya Partai Aceh terlihat pragmatis dalam aspek kandidasi. Sepatutnya partai politik melaksanakan pola kaderisasi di dalam partai apabila ingin menciptakan kader baru yang kompeten serta menjamin perputaran elit partai. Pada sesi berikutnya, kader-kader hendak ditunjukan buat jadi kader untuk menduduki jabatan publik (Pamungkas dan Parlindungan, 2011). Sumbernya diperoleh lewat sebagian metode antara lain melalui pembelajaran politik yang terencana dibangun buat menyeleksi kader yang jadi *underbow* partai, serta lewat organisasi yang sepemahaman dengan partai (Hamid, 2008).

Tabel 3
Bentuk Organisasi Partai Aceh

Variabel	Partai Aceh
Karakter partai	Inklusif
Paradigma	PA-power-resources
Jenis kepemimpinan	Tersebar
Cara pengambilan keputusan	Patronase-tend to-democratic
Level organisasi	23 wilayah administrative
Sifat organisasi	Formal-profesional
Rekrutmen	Terbuka
Kandidasi	Pragmatis
Motif anggota	Kekuasaan

Sumber: Hajad (2016)

Strategi Partai Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan aktif mensosialisasikan tim pemenang dengan masyarakat yaitu tentang sejarah konflik antara GAM dan RI di Aceh yang saat itu GAM berjasa untuk memperjuangkan Aceh agar menjadi lebih sejahtera, di segala bidang. Strategi lain termasuk kampanye politik, strategi masalah politik dan strategi komunikasi politik. Dengan demikian, Partai Aceh dapat memperoleh kepercayaan masyarakat setelah berhasil melaksanakan pemasaran politik, dan masyarakat akan memberikan dukungan kepada mereka, sehingga tercipta komunikasi dan kerjasama yang baik dalam jangka waktu yang berkelanjutan melalui segmentasi yang rata-rata.

SIMPULAN

Infrastruktur politik dapat dikatakan sebagai bagian dasar dari fondasi dunia politik suatu negara. Infrastruktur politik lebih cenderung mengelompokkan orang

sesuai dengan kepentingannya. Infrastruktur politik merupakan proses politik dalam proses kekuasaan lembaga swadaya masyarakat. Dalam kelembagaan tersebut, lembaga-lembaga tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara langsung atau tidak, sehingga output yang dihasilkan adalah output yang bagus.

Infrastruktur politik sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan sistem sosial dan politik dalam masyarakat. Salah satunya yang paling dekat dengan masyarakat adalah partai politik yang berkedudukan selaku infrastruktur politik kepartaian dalam sebuah sistem politik harus dapat berfungsi untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak memecah belah dan dapat meminimalisir konflik dalam masyarakat.

Salah satu partai yang cukup dikenal oleh masyarakat Kota Banda Aceh adalah Partai Aceh. Partai Aceh juga memiliki pengaruh yang besar terhadap

tatanan kehidupan masyarakat dan politik, salah satunya berpengaruh terhadap partisipasi pemilih masyarakat Kota Banda Aceh. Dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Banda Aceh, Partai Aceh memiliki beberapa strategi diantaranya dengan aktif mensosialisasikan tim pemenangan dalam masyarakat, kampanye politik, strategi isu politik, dan strategi komunikasi politik yang bertujuan untuk mengambil hati masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2014). *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*. Diakses dari: http://www.jimly.com/makalah/namafile/22/DINAMIKA_PARTAI_POLITIK.doc
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh (2017). *Ini Rincian Jumlah Pemilih di Kota Banda Aceh*. Diakses dari: <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id/2017/12/17/ini-rincian-jumlah-pemilih-di-kota-banda-aceh/>
- Bawaslu Aceh. (2020). *Pemilu 2019, Partisipasi Masyarakat Aceh Sangat Tinggi*. Diakses dari: <https://aceh.bawaslu.go.id/pemilu-2019-partisipasi-masyarakat-aceh-sangat-tinggi/>
- Hajad, V. (2016). Kandidasi Partai Aceh Menjelang Pemilihan Gubernur 2017. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 63-70.
- Hamid, A. F., & Saripudin, H. A. (2008). *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan.
- Hardiyanti, S., Amin, M., & Warjio, W. (2021). Model Sosialisasi Pemilihan Presiden 2019 di Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. *PERSPEKTIF*, 10(1), 160-170.
- Hasan, E. (2019). Kemenangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Pada Pilkada 2017 (Suatu Penelitian Terhadap Pemasaran Politik Partai Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(2).
- Hendrik, D. (2010). Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Jurnal Demokrasi*, 9(2), 137-148.
- Juliani, R., Nurkhalis, N., & Juliana, R. (2020). Pengaruh Media Dalam Konflik Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kota Banda Aceh Dan Meulaboh. *Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 11-19.
- Kumparan. (2019). *Partisipasi Pemilih di Aceh Meningkat, Prabowo Raup 2,4 Juta Suara*. Diakses dari: <https://kumparan.com/kumparannews/partisipasi-pemilih-di-aceh-meningkat-prabowo-raup-2-4-juta-suara-1r4Qcq3hvwyl/full>
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pamungkas, S., & Parlindungan, U. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfareism.
- Pemerintah Kota Banda Aceh (2021). *Demografi*. Diakses dari: <http://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>
- Priyanto, S. (2017). *Modul 3: Wajah Demokrasi Kita*. Diakses dari:

<https://emodul.kemdikbud.go.id/C-Pkn-3/C-Pkn-3.pdf>.

- Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 511-518.
- Rozi, S. (2006). *Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak, Potret Birokrasi dan Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rush, M., & Althoff, P. (2000). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shobari, I. (2017). *Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Ponorogo (studi kasus di Partai GOLKAR dan PKB kabupaten Ponorogo)*. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Suharyanto, A. (2016). Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik Pada Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 6(2), 123-136.
- Tasar, M. (2015). Kekalahan Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif 2014. *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 15(15), 105-108.